

TRANSITIVITAS DALAM TEKS PERDA KEPARIWISATAAN KABUPATEN TABANAN

Ni Putu Veny Narlianti⁽¹⁾, I Ketut Darma Laksana⁽²⁾, Putu Utama⁽³⁾

Jl. Tukad pakerisan Gang XX/4
08563836951

venynarliantiputu@yahoo.co.id

^{(2), (3)} Program Magister (S-2) Linguistik, Program Pascasarjana, Universitas Udayana

Jl. Nias No 13 Denpasar, 80114

Telepon (0361) 224121

⁽²⁾darmalaksana27@yahoo.com; ⁽³⁾sutama_uyayana@yahoo.com

ABSTRAK

Kajian transitivitas Teks Perda Kepariwisata Kabupaten Tabanan (TPKKT) bertujuan untuk mengetahui sistem transitivitas dalam TPKKT. Kajian transitivitas berhubungan dengan unsur gramatika yang dapat digunakan untuk mengungkapkan partisipan yang terlibat dalam suatu peristiwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari Teks Perda Kepariwisata Kabupaten Tabanan (TPKKT). Teori yang digunakan adalah teori Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) yang dikemukakan oleh Halliday (1985). Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik catat. Metode penyajian hasil analisis data yang digunakan adalah metode formal dan informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah proses yang paling banyak digunakan dalam TPKKT adalah proses material 215 atau 50,3%, proses relasional 99 atau 23,2%, proses mental 98 atau 22,9%, proses wujud 11 atau 2,6%, proses verbal 2 atau 0,5% dan tingkah laku 2 atau 0,5%.

Kata kunci: Teks Peraturan daerah, transitivitas, proses

ABSTRACT

The study of transitivity towards the Local-Regencies Rule of Tourism in Tabanan regency (abbreviated as TPKKT) aimed to determine the transitivity system in TPKKT. This transitivity study was particularly associated with grammatical elements that could be used to reveal the participants involved in the incident. Furthermore, this study used a qualitative approach, on which the data sources were obtained from the Tourism Regulation Text in Tabanan regency (TPKKT). The theory used in this research was the theory of Systemic Functional Linguistics (SFL) proposed by Halliday (1985). The data collection methods and techniques used in this research was observational and technical note. The method of presenting the data analysis results was the formal and informal methods. The results of this study showed that the number of the most widely used process in TPKKT was the process of materia 215 or 50.3%, relational 99 or 23.2%, mental 98 or 22.9%, form 11 or 2.6%, verbal 2 or 0.5%, and behavior 2 or 0.5%.

Keywords: Local-Regencies Rule, transitivity, process

PENDAHULUAN

Bahasa memiliki peranan yang penting dalam menyampaikan sebuah informasi kepada khalayak agar dapat dipahami secara utuh. Bahasa memiliki banyak ragam. Ragam bahasa menurut sarananya, lazim dibagi atas ragam lisan dan ragam tulisan (Alwi, 2003:7). TPKKT merupakan teks

yang menggunakan ragam tulis untuk menyampaikan informasi mengenai aturan-aturan yang ada pada suatu daerah. Perda sebagai produk hukum memiliki ragam bahasa yang khas. Bahasa Indonesia ragam hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum, mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri (Hartini, 2014:8). Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam perda bersifat mengatur, menata, dan mengikat. Dalam filsafat bahasa, terdapat suatu paham yang menyatakan bahwa bahasa pada hakikatnya merupakan suatu alat pengungkapan (ekspresi), yang tersusun dari substansi ekspresi dan penyusunannya (Kaelan, 2002:277).

Peraturan daerah (Perda) dimiliki oleh setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Sejak lahirnya otonomi daerah sekitar tahun 1999, setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan sepenuhnya terhadap daerah yang dipimpinnya. Dalam hal ini, pemerintah pusat (provinsi) tidak berhak turut serta dalam pengaturan masing-masing daerah.

Pemerintah daerah terus bergerak untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Demikian pula halnya dengan kabupaten Tabanan. Salah satu sektor yang terus berkembang saat ini adalah sektor pariwisata. Untuk dapat menata pariwisata menjadi lebih baik diperlukan adanya Perda sebagai payung hukum dalam menjalankan kepariwisataan di daerah. Perda berisikan materi muatan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas membantu, serta menampung kondisi khusus daerah dan atau menjabarkan lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Syamsudin, 2011:11).

Penelitian ini mengkaji bahasa yang digunakan dalam TPKKT dengan teori linguistik sistemik fungsional (LSF), khususnya sistem transitivitas. Penelitian mengenai TPKKT menarik untuk dilakukan karena perda sebagai salah satu teks yang bersifat persuasif belum pernah dikaji dengan menggunakan teori LSF. Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang senantiasa

perlu dikembangkan sebagai salah satu aset pendapatan daerah. Oleh karena itu, Perda mengenai Kepariwisata menarik untuk dikaji.

Berdasarkan paparan di atas, permasalahan yang akan didiskusikan adalah bagaimanakah sistem transitivitas dalam TPKKT? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem transitivitas yang terdapat dalam TPKKT yang dapat dilihat melalui gramatika struktur klausa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pemahaman bahasa dalam sebuah wacana politik (Perda Kepariwisata), dapat memberikan sumbangan dalam penerapan teori LSF khususnya sistem transitivitas suatu bahasa.

METODE PENELITIAN

Metode memiliki hubungan yang erat dengan teori, artinya pemilihan penggunaan metode dan teknik-teknik tertentu pada tahapan penyediaan data sangat ditentukan oleh watak dasar dari objek penelitian (Mahsun, 2006:17). TPKKT dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber (Sugiyono, 2012:331). Data dalam penelitian ini diperoleh dari teks perda kepariwisataan yang berlaku di Kabupaten Tabanan. Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak, yakni metode simak tulisan. Peneliti menyimak teks untuk menemukan klausa yang ada dalam TPKKT. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ditunjang dengan teknik catat yang dilakukan dengan mencatat setiap klausa yang ada dalam TPKKT.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, dan definisi suatu situasi tertentu dalam konteks tertentu (Sarwono, 2006:257). Analisis data kualitatif dilaksanakan dengan eksplikasi, yaitu melibatkan kegiatan penjelasan, pengklarifikasian, dan penganotasian materinya (Titscher, 2009:107; Mayring 1988: 68). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini dipaparkan secara deskriptif karena berdasarkan pemaparan Moleong (1989:3), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan. Metode penyajian hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode formal dan informal.

PEMBAHASAN

Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah ketransitifan yang dalam pandangan LSF dikenal dengan transitivitas (*transitivity*) yaitu hal-hal yang menyangkut unsur gramatika yang digunakan secara sistematis untuk mengungkapkan hubungan-hubungan antara partisipan-partisipan yang terlibat dalam suatu perbuatan, keadaan atau peristiwa (Kridalaksana, 2008:122). Dalam LSF, transitivitas tidak hanya berkaitan dengan bidang sintaksis tetapi berkaitan pula dengan bidang semantik. Transitivitas pada bidang semantik dikenal dengan istilah peran makro (*semantic role*) yang terdiri atas *ideational role*. *Ideational role* ini tersusun atas proses, partisipan, dan sirkumstan (Morley, 2009:112-123).

Secara fungsional, bahasa merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fungsi bahasa yang diperlukan oleh manusia salah satunya adalah untuk menggambarkan pengalaman. Pengalaman manusia mengenai alam semesta yang bukan linguistik, perlu dipresentasikan menjadi pengalaman semiotik-linguistik agar dapat dipertukarkan dalam konteks sosial ketika manusia berkomunikasi dengan yang lainnya.

Satu unit pengalaman linguistik yang lengkap dapat direalisasikan dalam bentuk klausa. Pendekatan LSF mendefinisikan klausa sebagai unit gramatikal terbesar, dan klausa kompleks terdiri atas dua klausa atau lebih yang berhubungan secara logikal (Sinar, 2012:19). Klausa merupakan unit sintaksis yang mengandung verba yang dibangun lebih kecil dari kalimat (Katamba, 1993). Ciri-ciri klausa adalah (1) terdiri atas satu predikat, (2) klausa dapat menjadi kalimat apabila ditambahkan intonasi final, (3) dalam kalimat plural, klausa merupakan bagian dari kalimat, (4) klausa dapat diperluas dengan menambahkan atribut fungsi-fungsi yang belum terdapat dalam klausa tersebut.

Klausa sebagai pengungkap pengalaman linguistik yang lengkap terdiri atas tiga unsur, yaitu: proses (*process*), peristiwa (*participant*), dan sirkumstan (*circumstance*). Unsur proses

mengacu pada kegiatan atau aktivitas yang direalisasikan oleh berbagai kategori, seperti verba dan adjektiva. Unsur partisipan mengacu pada orang, binatang, atau benda yang memiliki keterkaitan dengan unsur proses. Unsur sirkumstan mengacu pada lingkungan, yaitu tempat, cara terjadinya proses. Inti dari satu pengalaman linguistik adalah proses. Proses dapat menentukan jumlah dan kategori partisipan dan juga menentukan sirkumstan secara tidak langsung.

Dalam metafungsi bahasa, bahasa memiliki tiga fungsi utama, yaitu: tekstual, ideasional, dan interpersonal. Analisis transitivitas berfokus pada gramatika struktur klausa yang merealisasikan makna ideasional, yaitu ide mengenai pengalaman linguistik. Fungsi ideasional memaparkan ide, gagasan tentang pengalaman, khususnya pengalaman linguistik yang berpusat pada unsur proses dengan klasifikasi pengalaman utama (proses utama) dan pengalaman pelengkap (proses pelengkap).

Transitivitas merupakan sistem kategorisasi semantik yang valensinya berpusat pada unsur proses. Sebagai suatu sistem, unsur proses dalam transitivitas dapat bervalensi dengan satu partisipan ataupun lebih. Hal ini tergantung dari jenis prosesnya.

Transitivitas memiliki partisipan jenis lain, yaitu partisipan yang menyatu dengan proses dan partisipan yang berada di luar jangkauan proses. Partisipan yang menyatu dengan proses umumnya diidentifikasi dengan label jangkauan (*range*). Partisipan yang berada di luar jangkauan proses disebut peminfaat (*beneficiary*). Peminfaat biasanya adalah benda atau orang yang dituju suatu layanan. Biasanya peminfaat dibedakan lagi berdasarkan posisinya. Peminfaat dilabeli penerima (*recipient*) apabila didahului oleh preposisi kepada (dalam bahasa Indonesia) dan dilabeli klien (*client*) apabila didahului preposisi untuk.

TPKKT merupakan teks yang bergenre instruksi. Bahasa yang digunakan dalam TPKKT adalah bahasa Indonesia ragam hukum. Bahasa Indonesia ragam hukum merupakan ragam bahasa yang penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum karena fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri, bahasa hukum Indonesia harus memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD.

Transitivitas dalam TPKKT

Sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa valensi dalam transitivitas berpusat pada unsur proses. Oleh karena itu, analisis transitivitas dalam TPKKT berpusat pada unsur proses. Untuk mengetahui kekerapan kemunculan proses dalam TPKKT dilakukan dengan menghitung penggunaan klausa yang menduduki masing-masing proses. Identifikasi jumlah proses yang terdapat pada TPKKT dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Transitivitas dalam TPKKT

Proses	Jumlah Klausa	Presentase (%)
Proses Material	215	50,3
Proses Relasional	99	23,2
Proses Mental	98	22,9
Proses Wujud	11	2,6
Proses Verbal	2	0,5
Proses Tingkah Laku	2	0,5
Jumlah	427	100

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah proses yang pada TPKKT. Jumlah proses yang paling banyak digunakan dalam TPKKT adalah proses material, kemudian disusul oleh proses relasional, proses mental, proses wujud, proses verbal dan tingkah laku.

Pada TPKKT, proses material menduduki jumlah yang paling tinggi. Hal ini terjadi karena TPKKT merupakan teks yang menampilkan kegiatan yang harus dikerjakan. Urutan kedua diisi oleh proses relasional. Proses relasional pemakaiannya cukup tinggi karena pada TPKKT terdapat banyak penjelasan mengenai hubungan peran partisipannya.

Urutan ketiga diisi oleh proses mental. Proses mental pada TPKKT cukup banyak karena terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan sebuah teks perda. Urutan keempat diisi oleh proses wujud. Proses wujud umumnya mengungkapkan suatu entitas. Dalam hal ini, ada beberapa entitas yang diungkapkan antara lain, keberadaan usaha penyediaan akomodasi dalam bidang pariwisata.

Urutan kelima diisi oleh proses verbal. Dalam TPKKT terdapat sedikit proses verbal. Hal ini terjadi karena TPKKT merupakan teks tertulis, sehingga tidak banyak memuat hal yang harus dikatakan secara langsung. Selanjutnya, pada urutan terakhir, urutan keenam diisi oleh proses tingkah laku. Proses tingkah laku berkaitan dengan gambaran perilaku partisipan dalam suatu peristiwa. Hanya sedikit proses tingkah laku yang terdapat dalam TPKKT. Hal ini terjadi karena dalam TPKKT tidak banyak tingkah laku yang dilakukan oleh partisipan.

Berdasarkan uraian di atas, khususnya berkaitan dengan gambaran angka yang digunakan pada keenam jenis proses dalam TPKKT, maka dapat ditegaskan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan angka tersebut. Hal-hal yang dapat ditegaskan dijabarkan sebagai berikut.

Penggunaan proses material secara dominan yaitu sebanyak 215 atau 50,3% dari keseluruhan jenis proses dalam TPKKT. Penggunaan proses material berkaitan dengan 'kegiatan' dan 'kejadian' yang mempunyai partisipan manusia atau benda yang mengambil bagian atau melibatkan diri. Proses material paling banyak digunakan dibandingkan dengan proses yang lainnya karena dalam TPKKT ini yang disampaikan adalah kegiatan yang harus dilakukan.

Pada urutan kedua, terdapat penggunaan proses relasional sebesar 99 atau 23,2%. Proses relasional hadir sebagai representasi dari fungsi ideasional yang mengungkapkan adanya hubungan antar entitas seperti hubungan antara pemerintah dengan hal yang berkaitan dengan kepariwisataan. Bagian akhir TPKKT berisi penjelasan mengenai beberapa bagian isi dari TPKKT yang banyak menggunakan proses relasional.

Proses yang ketiga adalah proses mental sebanyak 98 atau 22,9%. Proses mental cukup banyak muncul dalam TPKKT. Hal ini dikarenakan ada cukup banyak ide atau gagasan yang diperlukan untuk menjadi landasan yang kuat dalam pembentukan perda kepariwisataan. Ide atau gagasan yang menjadi landasan terbentuknya perda kepariwisataan tergolong sebagai aktivitas yang menyangkut indra, persepsi, dan kognisi yang terjadi pada pelibat.

Proses selanjutnya adalah proses wujud sebanyak 11 atau 2,6%. Proses wujud menunjukkan bahwa sesuatu itu ada wujud atau eksis. Kemunculan proses ini sedikit dalam TPKKT, hanya

beberapa hal yang berkaitan dengan kepariwisataan yang perlu ditunjukkan secara nyata keberadaannya. Keseluruhan penggunaan proses wujud tersebut merupakan tema yang penting untuk disampaikan agar dapat memperjelas segala hal yang berkaitan dengan kepariwisataan.

Proses verbal menduduki urutan kelima sebanyak 2 atau 0,5%. Pada TPKKT ditemukan sedikit penggunaan proses verbal. Alasan utama sedikitnya kemunculan proses verbal ini adalah karena TPKKT merupakan teks tulis yang memuat mengenai aturan-aturan yang bersifat tidak langsung. Namun, ada beberapa klausa menggunakan kosakata yang merupakan jenis proses verbal.

Proses yang terdapat pada urutan terakhir adalah proses tingkah laku. Proses ini ditemukan sebanyak 2 atau 0,5% dari keseluruhan proses yang ada. Penggunaan kosakata yang menduduki kategori proses tingkah laku dalam TPKKT memiliki jumlah yang sama dengan proses verbal. Proses ini merepresentasikan perbuatan atau tingkah laku para pelibat teks. Proses ini berhubungan dengan faktor fisiologis dan psikologis. Kemunculan proses tingkah laku dalam jumlah yang sedikit dikarenakan TPKKT menyampaikan instruksi yang berupa kegiatan yang harus dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa kemunculan angka-angka penggunaan proses seperti tabel di atas merupakan sesuatu yang bersifat utuh dan membentuk satu kesatuan yang menjadi ciri TPKKT. Keseluruhan penggunaan proses secara utuh bersifat saling mendukung dan saling melengkapi sebagai satu unit teks.

Unsur Proses

Pendekatan LSF memandang bahwa transitivitas adalah representasi pengalaman manusia dalam bahasa yang direalisasikan dengan bentuk pengalaman linguistik. Satu unit pengalaman linguistik yang sempurna direalisasikan dalam bentuk tata bahasa yang berupa klausa. Suatu klausa umumnya terdiri atas unsur proses, partisipan, dan sirkumstan. Secara dikotomis, unsur proses dapat dibedakan atas proses utama dan proses pelengkap. Proses utama terdiri atas proses material, mental, dan relasional. Proses pelengkap terdiri atas proses verbal, tingkah laku, dan wujud. Klasifikasi seperti itu tidak dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi yang berbeda tetapi

berdasarkan keumuman dalam konteks kehidupan manusia sehari-hari. Persoalan kekerapan munculnya jenis proses tersebut tergantung pada realitas teks dan konteks yang ada.

Untuk lebih memahami eksistensi unsur proses dalam unit pengalaman linguistik, bagian ini menganalisis proses yang ditemukan dalam TPKKT. Dengan demikian, kemiripan atau perbedaan antara proses yang satu dengan yang lainnya menjadi jelas. Uraian analisis dimulai dengan urutan peringkat seperti yang tertera pada tabel.

Proses Material

Proses material merupakan jenis proses yang menunjukkan suatu aktivitas manusia yang menyangkut kegiatan fisik serta bersifat nyata dan dapat diamati dengan indra. Proses material dapat terjadi di luar diri manusia dan dapat dikenakan kepada maujud lain. Proses material dapat mengikat dua partisipan. Partisipan I dilabeli dengan nama aktor dan partisipan II dilabeli dengan tujuan (Halliday, 1985:103, Sinar, 2012:30-31).

Proses material dapat terdiri atas satu partisipan ataupun dua partisipan. Secara semantik, proses material menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan dikenakan pada suatu maujud di luar dirinya. Proses material dapat berupa ‘kegiatan’ ataupun ‘kejadian’. Proses kejadian dapat dibuktikan dengan cara: apabila tujuan ada di dalam proses maka ada kemungkinan representasinya pada dua bentuk, yaitu bentuk aktif atau pasif. Berikut ditampilkan contoh proses material.

Tabel 2. Contoh (1-1) Pasal 35 Teks Perda Kepariwisataan Kabupaten Tabanan

Pemerintah daerah	memberikan	peluang pendanaan
Aktor	Proses: Material	Tujuan
Partisipan I	Proses	Partisipan II

Tabel 3. Contoh (1-2) Pasal 29. Ayat 1 Teks Perda Kepariwisataan Kabupaten Tabanan

Pemerintah Daerah	melakukan	koordinasi strategis lintas sektor
Aktor	Proses: Material	Tujuan
Partisipan I	Proses	Partisipan II

Tabel 4. Contoh (1-3) Pasal 36. Ayat 1 Teks Perda Kepariwisata Kabupaten Tabanan

Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan	dilaksanakan	oleh Bupati
Tujuan	Proses: Material	Aktor
Partisipan I	Proses	Partisipan II

Contoh (1-1 -- 1-3) memuat proses material seperti *memberikan, melakukan, dan dilaksanakan*. Proses material pada contoh (1-1 -- 1-3) terdiri atas dua partisipan, proses tersebut menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan ditunjukkan kepada suatu maujud yang berada di luar dirinya. Contoh (1-1) merupakan proses material kegiatan dan contoh (1-2 dan 1-3) merupakan proses material kejadian. Proses material pada contoh (1-2) disajikan dalam bentuk aktif, sedangkan pada contoh (1-3) disajikan dalam bentuk pasif.

Selain contoh di atas, dalam TPKKT juga terdapat proses material yang bervaleksi hanya dengan satu partisipan. Proses material dengan satu partisipan terjadi karena salah satu partisipannya mengalami pelesapan. TPKKT merupakan teks yang terdiri atas kalimat yang rinciannya tersusun ke bawah. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh data berikut.

(1-4) Pasal 21

(1) //Setiap orang berhak :

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata;
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan; dan/atau
- e. mendapatkan penghargaan atau jasa penemuan, pelestarian, dan penyelamatan benda cagar budaya.//

Data (5-4) di atas menampilkan isi pasal 21 ayat 1 dari TPKKT. Pasal 1 ayat 1 tersebut terdiri atas satu kalimat yang rinciannya ditulis ke bawah. Penulisan kalimat dengan rincian yang ditulis ke bawah merupakan salah satu ciri dari penulisan sebuah peraturan perundang-undangan. Kalimat pada pasal 21 ayat 1 tersebut terdiri atas beberapa klausa, salah satu klausanya dapat dilihat dari contoh berikut.

Tabel 5. Contoh (1-5) Pasal 21 Ayat 1b. Teks Perda Kepariwisata Kabupaten Tabanan

Melakukan	Usaha Pariwisata
Proses: Material	Tujuan
Proses	Partisipan II

Contoh (1-5) di atas merupakan klausa yang mengandung proses material dengan satu partisipan. Salah satu partisipan dalam proses material tersebut mengalami pelesapan. Berdasarkan data (1-5), dapat diketahui bahwa partisipan yang mengalami pelesapan adalah partisipan yang dilabeli aktor, yaitu *setiap orang*. Pelesapan pada salah satu partisipan ini terjadi karena untuk menghindari penggunaan kata yang sama secara berurutan. Jika pada data (1-5) semua klausa berisikan frasa *setiap orang*, maka instruksi pada data (1-5) menjadi tidak efektif. Dalam TPKKT terdapat banyak klausa mengalami pelesapan pada salah satu partisipannya, terutama pada partisipan yang dilabeli aktor. Hal ini terjadi karena dalam suatu instruksi terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang yang sama, sehingga untuk mengefektifkan instruksi tersebut subjek dalam klausa akan disebutkan sekali saja.

Proses Relasional

Proses relasional adalah jenis proses yang berfungsi untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas lainnya (Halliday, 1985:112). Hubungan yang dibentuk dapat berupa hubungan antara pemilik dan termilik yang disebut dengan hubungan kepemilikan. Proses relasional dapat berupa hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya yang disebut hubungan atributif, dan dapat pula berupa hubungan antara satu entitas dengan lingkungannya yang disebut hubungan identifikasi.

Proses relasional dapat bervalensi dengan dua partisipan, baik berupa entitas manusia, benda, ruang, waktu, ataupun entitas lainnya yang memiliki identitas tertentu. Dalam proses relasional partisipan I dilabeli dengan nama pemilik atau penyandang atau juga bentuk/tanda, dan partisipan II dilabeli dengan nama termilik atau atribut, atau nilai. Proses relasional dalam TPKKT dapat dilihat dari contoh berikut ini.

Tabel 6. Contoh (1-6) Pasal 1 Ayat 7 Teks Perda Kepariwisataan Kabupaten Tabanan

Wisatawan	Adalah	orang yang melakukan wisata
Penyandang	Proses: relasional	Atribut
Partisipan I	Proses	Partisipan II

Tabel 7. Contoh (1-7). Penjelasan Teks Perda Kepariwisata Kabupaten Tabanan

Manfaat sosial dan budaya	berupa	kesempatan
Bentuk	Proses: relasional	Nilai
Partisipan I	Proses	Partisipan II

Tabel 8. Contoh (1-8) Pasal 7a Teks Perda Kepariwisata Kabupaten Tabanan

Pembangunan kepariwisataan	meliputi	industri pariwisata
Pemiliki	Proses: relasional	Termilik
Partisipan I	Proses	Partisipan II

Contoh (1-6 -- 1-8) terdapat proses relasional seperti *adalah*, *berupa*, dan *meliputi*. Proses relasional tersebut berfungsi untuk menghubungkan dua entitas, yaitu partisipan I dengan partisipan II. Contoh (1-6) ditunjukkan hubungan relasional: atributif. Contoh (1-7) menunjukkan hubungan relasional:identifikasi, dan contoh (1-8) menunjukkan hubungan relasional: kepemilikan. Valensi antara proses relasional dengan partisipannya memiliki pelabelan yang berbeda. Hubungan kepemilikan selalu dilabeli dengan relasi antara pemilik dan termilik. Hubungan atributif akan selalu dilabeli dengan penyandang dan atributif. Hubungan identifikasi akan selalu dilabeli dengan relasi antara bentuk dan nilai.

Proses Mental

Proses mental adalah proses yang mengungkapkan aktivitas manusia yang menyangkut indera, persepsi, kognisi, keinginan, dan emosi. Keinginan berupa angan-angan yang menyangkut mental atau aspek psikologis kehidupan. Proses Mental terjadi di dalam diri manusia dan mengenai mental kehidupan.

Proses mental dapat melibatkan lebih dari satu partisipan. Dalam hal ini, proses mental mempunyai dua partisipan, yang pertama manusia atau seperti-manusia yang sadar yang mempunyai indera melihat, merasa, dan memikir. Partisipan yang mempunyai indera-indera ini dinamakan sebagai pengindera. Partisipan kedua dapat berupa benda ataupun fakta adalah partisipan yang diindera yang disebut fenomena (Halliday, 1985:111, Sinar, 2012:31-32). Dalam unit klausa, hal ini dapat pula disertai dengan unsur sirkumstan. Proses mental yang terdapat dalam TPKKT dapat dilihat dalam contoh berikut.

Tabel 9. Contoh (1-9) Pendahuluan Teks Perda Kepariwisata Kabupaten Tabanan

Bupati Tabanan	Mengingat	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1985
Pengindera	Proses: Mental	Fenomena
Partisipan I	Proses	Partisipan II

Tabel 10. Contoh (1-10) Pasal 12 Ayat 3 Teks Perda Kepariwisata Kabupaten Tabanan

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	harus memperhatikan	aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat
Pengindera	Proses: Mental	Fenomena
Partisipan I	Proses	Partisipan II

Pada contoh (1-9), proses mental *mengingat* merupakan proses yang berkaitan dengan aktivitas kognisi dan wilayahnya masih berada dalam pikiran. Berbeda halnya dengan contoh (1-10), pada contoh tersebut terdapat proses mental *memperhatikan* yang merupakan proses yang berkaitan dengan persepsi. Objek kognisi dan persepsi tersebut menyangkut hal-hal yang abstrak yang dilabeli dengan fenomena. Sehingga, partisipan pertama secara logis dinamakan pengindera. Kosakata yang merupakan jenis proses mental yang digunakan dalam TPKKT adalah sebagai berikut.

Proses Wujud

Proses wujud merupakan proses yang mengungkapkan keberadaan suatu entitas. Proses ini hanya mampu mengikat satu partisipan. Partisipan dalam proses wujud dilabeli dengan maujud (Halliday, 1985:130, Sinar, 2012:35). Dalam analisis TPKKT, proses wujud ditemukan berupa keberadaan entitas, yaitu dapat berupa manusia, aktivitas, perilaku, pengharapan, dan entitas abstrak yang lainnya. Partisipan disebut sebagai maujud dapat berupa manusia, benda, keadaan dan perbuatan. Proses wujud yang terdapat dalam TPKKT dapat dilihat dari dua data berikut ini.

Tabel 11. Contoh (1-11) Pasal 43 Teks Perda Kepariwisata Kabupaten Tabanan

Pada saat	Peraturan Daerah	mulai berlaku
Sirkumstan	Maujud	Proses: wujud
Keterangan	Partisipan I	Proses

Tabel 12. Contoh (1-12) Penjelasan Teks Perda Kepariwisata Kabupaten Tabanan

melalui	penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
Proses: wujud	Maujud
Proses	Partisipan I

Contoh (1-11 dan 1-12) di atas dapat dilihat bahwa proses wujud meliputi *mulai berlaku* dan *melalui*. Proses wujud tersebut menunjukkan keberadaan satu entitas seperti yang disebutkan sebagai partisipan, yang disebut maujud. Contoh di atas dapat dilihat suatu entitas yang berupa benda dan manusia. Keberadaan entitas tersebut dijelaskan oleh proses wujud. Dengan demikian, secara sistemik, label untuk menunjukkan keberadaan identitas tersebut dinamakan proses wujud.

Proses Verbal

Proses verbal adalah jenis proses yang menunjukkan suatu aktivitas atau perbuatan yang menyangkut komunikasi antarpelibat berada dalam lingkup komunikasi verbal. Proses verbal dapat mengikat satu atau dua partisipan. Partisipan I dilabeli dengan penyampai, dan partisipan II dilabeli dengan perkataan. Partisipan yang diikat oleh proses verbal dapat berupa entitas manusia atau bukan manusia (Halliday, 1985:129, Sinar, 2012:35). Proses verbal dalam TPKKT dapat dilihat dari contoh berikut.

Tabel 13. Contoh (1-13) Pasal 38 Teks Perda Kepariwisata Kabupaten Tabanan

memanggil	orang	untuk didengar keterangannya
Proses: verbal	Perkataan	Klien
Proses	Partisipan II	Keterangan

Tabel 14. Contoh (1-14) Psl 38 Teks Perda Kepariwisata Kabupaten Tabanan

Penyidik	menyampaikan	hasil penyidikannya	kepada penuntut umum
Penyampai	Proses: verbal	Perkataan	Penerima
Partisipan I	Proses	Partisipan II	Keterangan

Pada data (1-13 dan 1-14) di atas, setiap unit pengalaman terdapat proses verbal, yaitu *memanggil* dan *menyampaikan*. Proses verbal pada data (1-13) bervalensi dengan satu partisipan dan data (5-14) bervalensi dengan dua partisipan. Partisipan I berupa entitas manusia dan partisipan II berupa entitas keadaan. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa proses verbal merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan informasi antarpelibat, sehingga valensinya tersusun

sedemikian rupa sebagai sistem tersendiri. Penggunaan proses verbal dalam TPKKT sangat terbatas, hal ini terjadi karena TPKKT merupakan teks tulis sehingga tidak perlu menyampaikan hal yang bersifat langsung seperti pada teks lisan.

Proses Tingkah Laku

Proses tingkah laku adalah proses yang menunjukkan aktivitas fisiologis yang menyatakan tingkah laku fisik suatu entitas, dalam hal ini adalah manusia. Proses perilaku hanya dapat mengikat atau bervalensi satu partisipan. Partisipan dalam proses ini disebut dengan petingkah laku. Proses tingkah laku hanya berkaitan dengan aktivitas fisik manusia yang menyangkut atau mengenai dirinya sendiri (Halliday, 1985:128-129). Proses tingkah laku yang terdapat dalam TPKKT dapat dilihat dari data berikut ini.

Tabel 15. Contoh (1-15) Pasal 17 Teks Perda Kepariwisataaan Kabupaten Tabanan

Bupati	dapat menunda	pendaftaran usaha pariwisata
Petingkah laku	Proses: Tingkah Laku	Sirkumstan
Partisipan I	Proses	Keterangan

Tabel 16. Contoh (1-16) Pasal 17 Teks Perda Kepariwisataaan Kabupaten Tabanan

Bupati	meninjau kembali	pendaftaran usaha pariwisata
Petingkah laku	Proses: Tingkah Laku	Sirkumstan
Partisipan I	Proses	Keterangan

Data (1-15 dan 1-16) di atas, terdapat proses tingkah laku *dapat menunda* dan *meninjau kembali*. Proses tingkah laku hanya dapat bervalensi satu partisipan saja. Proses tingkah laku secara fisiologis memang menunjukkan tingkah laku fisik tetapi tidak selamanya berkaitan hanya dengan organ tubuh saja. Tingkah laku juga dapat berbentuk tingkah laku semi fisik seperti pada data di atas, sehingga proses pada data di atas disebut sebagai proses tingkah laku.

Berdasarkan uraian mengenai unsur proses di atas, dapat diketahui bahwa unsur proses dalam satu unit pengalaman linguistik adalah unsur pusat. Unsur proses dapat menentukan kehadiran valensi, baik terhadap partisipan dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pada analisis TPKKT, konsep valensi dalam unsur proses hanya mengidentifikasi valensi yang bersifat wajib. Struktur yang melampaui valensi wajib tidak dibahas karena kehadiran unsur keterangan bersifat

manasuka. Struktur inti dari sebuah unit pengalaman linguistik hanya menyangkut valensi antara proses dengan partisipan. Unsur keterangan merupakan unsur yang berada di luar valensi, dan sifatnya hanya sebagai unsur tambahan informasi dalam suatu unit pengalaman linguistik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis transitivitas TPKKT dapat disimpulkan bahwa, proses yang paling banyak digunakan adalah proses material. Hal ini terjadi karena TPKKT merupakan teks yang bergenre instruksi. Teks bergenre instruksi tentunya memiliki urutan kegiatan atau kejadian yang harus dilaksanakan oleh partisipan. Urutan kegiatan atau kejadian inilah yang terealisasi dalam proses material. Proses material menduduki presentase tertinggi dari keenam proses dalam TPKKT. Urutan proses yang terdapat dalam TPKKT adalah sebagai berikut: Proses material 215 (50,3%), proses relasional (23,2%), proses mental (22,9%), proses wujud (2,6%), proses verbal (0,5%), dan proses tingkah laku (0,5%). Proses yang terjadi pada urutan pertama sampai ketiga dalam TPKKT merupakan proses utama, sedangkan proses pada urutan keempat sampai keenam merupakan proses tambahan. Penggunaan proses material yang tinggi menunjukkan bahwa partisipan dalam TPKKT lebih banyak tindakan atau kegiatan dilakukan dibandingkan dengan hal yang lainnya. Munculnya proses relasional pada urutan kedua dikarenakan banyak hal yang memerlukan penjelasan secara rinci mengenai hubungan peran partisipannya agar tidak memunculkan tafsir ganda. Proses mental muncul pada urutan ketiga karena dalam pembentukan TPKKT perlu mempertimbangkan banyak hal sebagai latar belakang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H. dkk. 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Aminudin. 1988. *Semantik: Pengantar Studi tentang Makna*. Malang: Universitas Pendidikan Malang.
- Eggs, S. 1994. *An Introduction to Systemic Functional Linguistics*. London. Pinter Publisher.
- Halliday, M.A.K. dan Hassan, R. 1976. *Cohesion in English*. London: Longman Group Ltd.
- Halliday, M.A.K. 1985. *Introduction to Functional Grammar*. Geelong: Deakin University Press.

- Hartini, L. 2014. *Bahasa dan Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Jorgensen, M. dan Louise, J. 2007. *Analisis Wacana Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Bahasa: Realitas Bahasa, Logika Bahasa, Hermeutika dan Postmodernisme*. Yogyakarta: Paradigma.
- Katamba, F. 1993. *Morphology*. London: Macmillan Press LTD.
- Kridalaksana, H. 2008. *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahsun. 2006. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morley, D.D. 2008. *Syntax in Functional Grammar: An Introduction to Lexicogrammar in Systemic Linguistics*. London: Continuum.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Schiffrin, D. 2007. *Ancangan Kajian Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinar, T. S. 2012. *Teori dan Analisis Wacana: Pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional*. Medan: Penerbit Mitra.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsudin, A. 2011. *Proses dan Teknik Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Titscher, S. dkk. 2009. *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.